

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 telah selesai disusun.

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Penajam, 9 Desember 2021

Pt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.  
PPU



**Mawar, ST, MM**

Nip. 19661231 199803 2 020

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016, pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tipe A terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat  
Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Perencanaan Program
  - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  - Kasi. Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
  - Kasi. Identitas Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - Kasi. Kelahiran dan Kematian
  - Kasi. Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status dan Pewarganegaraan
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
  - Kasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - Kasi. Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan
- f. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari
  - Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
  - Kasi. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana strategis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengolahan Data, Perpindahan Penduduk, Pendataan Kelahiran, Kematian serta Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Akta.
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Pemberian dan/atau pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta inovasi pelayanan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD.

Dalam rangka menggerakkan suatu sistem pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip Tata Pemerintahan (Good Governance), maka perlu disusun rencana kerja tahunan yang dapat mengatur program/kegiatan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat. Dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 diharapkan dapat memfasilitasi serta berperan penting dalam pengembangan pembangunan melalui pendaftaran dan pendataan penduduk sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan untuk pencapaian target kinerja. Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Renstra 2018-2023

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010.

14. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27 tahun 2017 tentang susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2021 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 yang diharapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipi
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
3. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir (real time).

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DUKCAPIL TAHUN 2020**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DUKCAPIL Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dukcapil
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dukcapil
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dukcapil



### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dukcapil
- 3.3 Program dan Kegiatan (dilengkapi matriks rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2022 dan prakiraan maju 2023)

### **BAB IV PENUTUP.**

## **BAB II.**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dukcapil Tahun 2020**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Tahun Anggaran 2020

N0.	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.251.594.766	2.990.285.662	261.309.104	91.96
		Gaji dan Tunjangan	1.836.344.766	1.676.662.854	261.309.104	90.30
		Tambahan Penghasilan PNS	1.415.250.000	1.313.622.808	101627.192	92.82
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.222.405.000	1.084.241.375	138.163.625	88.70
1.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.030.000	7.821.375	6.209.000	55.74
2.		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	13.825.460	2.974.540	82.29
3.		Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.930.000	7.224.730	4.705.270	60.56
4.		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	669.200.000	639.060.000	30.140.000	95.50
5.		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50.000.000	31.402.500	18.597.500	62.81
6.		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.290.000	93.209.100	80.900	99.91
7.		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000.000	8.707.800	25.292.200	25.61
8.		Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	3.500.000	3.489.000	11.000	99.69
9.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.380.000	350.000	4.030.000	7.99

NO.	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
10.		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	12.925.000	10.918.119	2.006.881	84.47
11.		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	160.400.000	136.228.666	24.171.334	84.93
12.		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	151.950.000	132.005.000	19.945.000	86.87
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		376.242.042	309.772.487	66.469.555	82.33
1.		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.000.000	254.965.000	13.035.000	95.14
2.		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	108.242.042	54.807.487	53.434.555	50.63
III.	Program penataan Administrasi Kependudukan		870.167.700	838.919.239	31.248.461	96.41
1.		Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK	6.000.000	3.500.000	2.500.000	53.33
2.		Pelayanan pencatatan perkawinan	1.025.700	825.000	200.700	80.43
3.		Penerapan dan penerbitan KTP-EI Se Kab. PPU	7.200.000	7.199.750	250	100.00
4.		Pelayanan pencatatan sipil	4.080.000	3.918.400	161.600	96.04

N0.	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
5.		Penerapan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	90.000.000	88.200.000	1.800.000	98.00
6.		Pemanfaatan Data dan Orientasi Inovasi Pelayanan Kependudukan	15.300.000	15.300.000	0	100.00
IV.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)		65.600.000	26.697.800	38.902.200	40.70
		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	65.600.000	26.697.800	38.902.200	40.70
		Jumlah Keseluruhan	5.039.447.508	4.529.940.474	510.507.034	89.89%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dukcapil

Pembangunan Kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten penajam Paser Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Keppendudukan (SIAK) sejak tahun 2007. Sistem tersebut bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tertib administrasi dibidang kependudukan serta terbangun database kependudukan yang terpusat. Database kependudukan yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberi gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk dan kedepannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Dari segi ketertiban administrasi kependudukan sudah mulai ada peningkatan kinerja walaupun belum maksimal, misal Penerbitan akte kelahiran tiap tahunnya mengalami peningkatan begitu pula Penerbitan KTP-EI dan KIA.

Pada Tahun 2012 Pemerintah Pusat melakukan terobosan dengan program KTP-EI, dimana setiap penduduk di Indonesia harus melakukan perekaman KTP-EI. Dengan ada program KTP-EI Pemerintah, setiap warga negara yang telah wajib KTP-EI hanya memiliki satu KTP, sehingga tidak ada lagi terdengar KTP ganda yang sebelum program KTP-EI warga bisa memiliki KTP dua sampai tiga KTP.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dukcapil**

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Dukcapil serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dukcapil dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

Adapun Isu-Isu Penting Penyelenggaraan di Dinas Dukcapil sebagai berikut :

1. Bidang adminisrasi kependudukan
  - a. Tingkat kepemilikan KIA Kabupaten Penajam Paser Utara masih rendah.
  - b. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan masih kurang.
2. Bidang data dan teknologi informasi
  - a. Data base kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir
  - b. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.

**3. Bidang catatan sipil.**

- a. Adanya permasalahan pengurusan akta catatan sipil bersifat lintas sektoral.
- b. Tempat ruang arsip pencatatan sipil belum representative dari segi kemananan dan kerahasiaan dokumen catatan sipil
- c. Pengelolaan dokumen arsip maupun akta catatan sipil masih bersifat manual.

**4. Bidang pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

- a. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan inovasi pelayanan masing belum bisa dilakukan

**5. Sekretariat**

- a. Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor
- b. Terbatasnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat SKPD.
- c. Tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sudah tidak representatif dari segi kemananan dan kerahasiaan dokumen catatan sipil.

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dukcapil**

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi tantangan. Setidaknya berkaitan dengan penerapan pola manajerial satuan kerja yang sangat menentukan bagi kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan. Pola ini banyak menjelaskan beberapa isu dan permasalahan dilihat dari sisi sistem manajemen kegiatan. Selain itu faktor-faktor yang berpengaruh di luar kapasitas kelembagaan yang ada seperti peraturan, proses anggaran, kewenangan lembaga, tingkat SDM masyarakat serta kondisi geografis wilayah.

Adapun Tantangan yang harus dihadapi Dinas Dukcapil yaitu :

- a. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.
- b. Minimnya kemampuan penguasaan teknologi informasi personil pelayanan.
- c. Anggapan bahwa administrasi kependudukan dilihat sebagai sumber pemasukan/pendapatan daerah, bukan sebagai pelayanan publik.

- d. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.
- e. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman.

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan antara lain :

- a. Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum.
- b. Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- c. Adanya pemegang kepentingan (stake holder) yang mewajibkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit dan SKPD atau lembaga lainnya.
- d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung keakuratan, kemutakhiran dan validasi data kependudukan.



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Melaksanakan amanat Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) Program Strategis Nasional bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Pemutakhiran data penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP Elektronik.

Program strategis nasional tersebut merupakan informasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya, Peningkatan efektifitas pelayanan publik, peningkatan keamanan negara dan efektifitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintah. Dalam 3 (Tiga) Program Strategis Nasional ini maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Dukcapil**

Untuk terwujudnya dan terarahnya pelaksanaan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir (real time)

Adapun Sasaran Rencana Kerja adalah sebagai berikut yaitu :

1. Terpenuhinya kepastian hukum dan hak-hak sipil penduduk.
2. Terwujudnya aparatur pelayanan yang profesional dan kompeten.



3. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai.
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kewajibannya dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
5. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir (real time) dan mudah diakses masyarakat.

### **3.3 Program dan Kegiatan (dilengkapi matrik rencana program dan Kegiatan Dinas Dukcapil tahun 2022 dan Prakiraan maju tahun 2023)**

Beberapa faktor permasalahan yang di hadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran / target dalam menetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Karena secara tidak langsung berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

b) Pengembangan Pusat data base kependudukan

Pengembangan Pusat data base kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana data base kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang di dukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

c) Pencapaian SPM

Standar pelayanan minimal merupakan adalah harapan capaian pelaksanaan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal tersebut akan di implementasikan pada proses dan output pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d) Penerapan KTP Elektronik

Penerapan KTP-Elektronik merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan

dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta.

e) Penerapan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dengan adanya program baru dari pemerintah pusat mengenai pentingnya setiap anak memiliki kartu identitas anak, diharapkan kepada orang tua untuk membuat kartu identitas anak mereka.

Uraian pelaksanaan program kegiatan, penyebaran lokasi program kegiatan serta rumusan program kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



LAMPIRAN II BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD  
NOMOR :  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 Dan Prakiran Maju Tahun 2023  
SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemeringtah Daerah			100%	Rp 4.369.035.982			100%	Rp 4.226.779.362
2.12.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan aparatur Dukcapil			Rp 3.547.842.925				Rp 3.839.705.362
2.12.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS yang mendapat gaji dan Tunjangan	Disduk capil	14 Bulan	Rp 3.466.222.925	APBD		14 Bulan	Rp 3.757.085.362
2.12.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Disduk capil	12 Bulan	Rp 81.620.000	APBD		12 Bulan	Rp 82.620.000
2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pelayanan administrasi Umum Pemerintah Daerah/Dukcapil			Rp 217.600.690				Rp 97.000.000
2.12.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	Disduk capil	12 Bulan	Rp 1.859.490	APBD		12 Bulan	Rp 5.000.000
2.12.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Disduk capil	6.000 lembar	Rp 6.000.000	APBD		12 Bulan	Rp 12.000.000
2.12.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat konsultasi dan Koordinasi Disdukcapil	Disduk capil	30 Kegiatan	Rp 209.741.200	APBD		50 Kegiatan	Rp 80.000.000

Kode	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang pelayanan publik pemerintah daerah/ Disdukcapil			Rp 453.882.367				Rp 86.754.000
2.12.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Surat Menyurat kantor	Disduk capil	12 Bulan	Rp 430.666.867	APBD		12 Bulan	Rp 60.000.000
2.12.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Disduk capil	12 Bulan	Rp 23.215.500	APBD		12 Bulan	Rp 26.754.000
2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemeringtah Daerah			Rp 149.710.000				Rp 203.320.000
2.12.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Disdukcapil	Disduk capil	16 unit	Rp 124.760.000	APBD	-	16 unit	Rp 153.320.000
2.12.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan	Disduk capil	35 unit	Rp 24.950.000	APBD	-	60 unit	Rp 50.000.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Prosentase dokumen kependudukan yang dilayani			100%	Rp 37.500.000			100%	Rp 80.000.000
2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan		100%	Rp 37.500.000			100%	Rp 80.000.000
2.12.02.2.01.02		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Terbitnya KTP-EL, KIA dan Dokumen lainnya	Disduk capil	21.952 Keping	Rp 37.500.000			35.000 Keping	Rp 80.000.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil			100%	Rp 37.500.000			100%	Rp 80.000.000
2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Tertib dokumentasi Pencatatan Sipil		100%	Rp 37.500.000			100%	Rp 80.000.000

Kode	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01.01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil oleh Masyarakat		6.000 akta	Rp 37.500.000	APBD		8.000 akta	Rp 80.000.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Data DKB (Data Kependudukan Bersih)			100%	Rp 75.000.000			100%	Rp 160.000.000
2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Pengelolaan dan pemanfaatan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	Rp 37.500.000			100%	Rp 80.000.000
2.12.04.2.01.01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Tersedianya data penduduk yang mutakhir	Disduk capil	4.777 jiwa	Rp 37.500.000	APBD		11.724 jiwa	Rp 80.000.000
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dokumen Adminduk dan Data Kependudukan terkini			Rp 37.500.000				Rp 80.000.000
2.12.04.2.03.04		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah data kependudukan terupdate dan dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	Disduk capil	20.000 NIK	Rp 37.500.000	APBD		20.000 NIK	Rp 80.000.000
				Jumlah			Rp 4.519.035.982				Rp 4.546.779.362

Penajam, 9 Desember 2021  
Plt. Kepala Dinas,  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Mawar, ST, MM**  
Nip. 19661231 199803 2 020



## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara

### SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan aparatur Dukcapil</b>				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan Tunjangan	Rp 3.466.222.925	Rp 3.757.085.362	14 Bulan	14 Bulan
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 81.620.000	Rp 82.620.000	12 Bulan	12 Bulan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi Umum Pemerintah Daerah/Dukcapil</b>				
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	Rp 1.859.490	Rp 5.000.000	12 Bulan	12 Bulan
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	6.000 lembar	12 Bulan
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat konsultasi dan Koordinasi Disdukcapil	Rp 209.741.200	Rp 80.000.000	30 Kegiatan	50 Kegiatan
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang pelayanan publik pemerintah daerah/ Disdukcapil</b>				
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Surat Menyurat kantor	Rp 430.666.867	Rp 60.000.000	12 Bulan	12 Bulan
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 23.215.500	Rp 26.754.000	12 Bulan	12 Bulan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 124.760.000	Rp 153.320.000	16 unit	16 unit
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 24.950.000	Rp 50.000.000	35 unit	60 unit
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Prosentase dokumen kependudukan yang dilayani</b>				
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Terlaksananya Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan</b>				
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terbitnya KTP-EL, KIA dan Dokumen lainnya	Rp 37.500.000	Rp 80.000.000	21.952 Keping	35.000 Keping
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil</b>				
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Tertib dokumentasi Pencatatan Sipil</b>				
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil oleh Masyarakat	Rp 37.500.000	Rp 80.000.000	6.000 akta	8.000 akta
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Data DKB (Data Kependudukan Bersih)</b>				
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Pengelolaan dan pemanfaatan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan</b>				
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya data penduduk yang mutakhir	Rp 37.500.000	Rp 80.000.000	4.777 jiwa	11.724 jiwa
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Dokumen Adminduk dan Data Kependudukan terkini</b>				
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan terupdate dan dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	Rp 37.500.000	Rp 80.000.000	20.000 NIK	20.000 NIK
	<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN</b>		<b>Rp 4.519.035.982</b>	<b>Rp 4.546.779.362</b>		

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	14 Bulan	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdukcapil	12 Bulan	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil	12 Bulan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapil	6.000 lembar	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	30 Kegiatan	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	12 Bulan	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil	12 Bulan	
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil	16 unit	
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil	35 unit	
10	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	21.952 Keping	
11	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	6.000 akta	
12	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil	4.777 jiwa	
13	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	20.000 NIK	

**Tabel Hasil Verifikasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Proyeksi Belanja 2022 dalam RKPD 2022	Pagu Setelah Verifikasi (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Alasan
1	2	3	4	5	6	7
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemeringtah Daerah	4.369.035.982	4.369.035.982		
2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan aparatur Dukcapil	3.547.842.925	3.547.842.925		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan Tunjangan	3.466.222.925	3.466.222.925	-	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	81.620.000	81.620.000	-	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi Umum Pemerintah Daerah/Dukcapil	217.600.690	217.600.690	-	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	1.859.490	1.859.490	-	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	6.000.000	6.000.000	-	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat konsultasi dan Koordinasi Disdukcapil	209.741.200	209.741.200	-	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan publik pemerintah daerah/ Disdukcapil	453.882.367	453.882.367	-	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Surat Menyurat kantor	430.666.867	430.666.867	-	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	23.215.500	23.215.500	-	



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Proyeksi Belanja 2022 dalam RKPD 2022	Pagu Setelah Verifikasi (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Alasan
1	2	3	4	5	6	7
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemeringtah Daerah	149.710.000	149.710.000	-	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Disdukcapil	124.760.000	124.760.000	-	
2.12.01.2.09.06	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan	24.950.000	24.950.000	-	
2.12.04	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase dokumen kependudukan yang dilayani	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.04.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terbitnya KTP-EL, KIA dan Dokumen lainnya	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Tertib dokumentasi Pencatatan Sipil	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil oleh Masyarakat	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Data DKB (Data Kependudukan Bersih)			-	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengelolaan dan pemanfaatan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya data penduduk yang mutakhir	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen Adminduk dan Data Kependudukan terkini	37.500.000	37.500.000	-	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan terupdate dan dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	37.500.000	37.500.000		

**PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2022**

No	Permasalahan	Judul Sub Kegiatan	Lokasi	Alasan
1	Masih banyaknya Persenol komputer, Notebook dan Printer yang sudah tidak layak (rusak) karena sudah terlalu lama pemakaiannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil	Keterbatasan Anggaran
2	Keterbatasan kendaraan dinas di Disdukcapil karena ada dua Kepala Bidang yang belum memiliki kendaraan dinas	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Disdukcapil	Keterbatasan Anggaran
3	Dikarenakan keterbatasan alat tulis kantor (pencetakan dan penggandaan) diperlukannya dalam penerbitan laporan bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Disdukcapil	Keterbatasan Anggaran
4	Kurang kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta catatan sipil) maka diperlukan pelayanan keliling (jemput bola) ke Desa dan kelurahan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Se Kab. PPU	Keterbatasan Anggaran
5	Masih sedikitnya instansi/OPD dalam melakukan kerjasama dengan Disdukcapil dalam pemanfaatan administrasi kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Keterbatasan Anggaran
6	keterbatasan dalam penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan membutuhkan data terupdate melalui pihak Desa dan Kelurahan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Se Kab. PPU	Keterbatasan Anggaran
7	Keterbatasan kendaraan dinas operasional di Disdukcapil yang ada sudah lama/tua sehingga tidak layak jalan ditambah dibatasinya pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang hanya boleh untuk kepala Dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Disdukcapil	Keterbatasan Anggaran

**REKAPITULASI PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022  
PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL**

**KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA**  
**PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	KODE (PN /PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2022					
		PRIORITAS /PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.466.222.925	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.620.000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.859.490	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.741.200	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	430.666.867	

NO	KODE (PN /PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2022					
		PRIORITAS /PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KETERANGAN
							Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.215.500	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.760.000	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.950.000	
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	37.500.000	
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	37.500.000	



NO	KODE (PN /PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2022					
		PRIORITAS /PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	37.500.000	
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	37.500.000	
JUMLAH									4.519.035.982	

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

**KABUPATEN : PETAJAM PASER UTARA**  
**PERANGKAP DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL**

NO	URUSAN	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET / SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET / SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET / SATUAN	PAGU SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	TERBITNYA DAN TERTIBNYA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Peningkatan Daerah	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya a pembayaran gaji dan tunjangan aparatur Dukcapil	14 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya a pembayaran gaji dan tunjangan aparatur Dukcapil	14 Bulan	3.466.222.925	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	81.620.000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya a pelayanan administrasi Umum Pemerintah Daerah/ Dukcapil	12 Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/	12 Bulan	1.859.490	
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi	12 Bulan	6.000.000	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya a Rapat konsultasi dan Koordinasi Disdukcapil	30 Kegiatan	209.741.200	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya jasa penunjang pelayanan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya a Surat Menyurat kantor	12 Bulan	430.666.867	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	23.215.500	



**REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DAN PAGU  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	8	13	4.519.035.982	Disdukcapil
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>4.519.035.982</b>	



**KONSISTENSI TARGET PROGRAM**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN**

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemeringtah Daerah	100%	adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Disdukcapil
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	1 Tahun					
		Prosentase dokumen kependudukan yang terlayani	96%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase dokumen kependudukan yang dilayani	100%	adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Disdukcapil
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	100%	adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Disdukcapil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Data DKB (Data Kependudukan Bersih)	100%	adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Disdukcapil

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2021 merupakan Program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2022 dengan harapan semoga pelaksanaan program kegiatan baik perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal sehingga hasil dan dampak dari intervensi program dan kegiatan bisa terwujud demi terciptanya optimalisasi pembangunan kemasyarakatan sehingga terwujud masyarakat sejahtera, bebas dari kemiskinan sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang dapat mensejahterakan masyarakat Penajam Paser Utara kedepan.